

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tulisan ini akan membahas mengenai strategi kampanye politik pemenang pemilihan kepala desa wonorejo, kecamatan tlogowungu, kabupaten pati tahun 2021. Pada april 2021 desa Wonorejo, Kec. Tlogowungu, Kab. Pati melakukan pemilihan Kepala Desa serentak. Pemilihan Kepala Desa secara substansi tidak jauh berbeda dengan pemilihan umum daerah, hanya pembeda terdapat pada unsur panitia penyelenggara pilkades dan pengawas pilkades. Unsur panitia penyelenggara pilkades sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersifat mandiri dan tidak memihak. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Desa (PILKADES) diikuti oleh tiga (3) kandidat/calon yaitu H. Suyikno, SE, Slamet Widodo, SH, dan Sumiyati. Hasil perolehan suara terbanyak H. Suyikno, SE mendapat 1.345 suara, dan di susul Slamet Widodo, SH dengan perolehan 1.204 suara dan yang terakhir Sumiyati dengan perolehan yaitu hanya 8 suara.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, peroleh suara terbanyak didapatkan oleh H. Suyikno, SE, sebesar 1.345 suara. Hal tersebut membuat H. Suyikno, SE memenangkan pada Pemilihan Umum Kepala Desa (PILKADES) desa Wonorejo, Kec. Tlogowungu, Kab. Pati tahun 2021. Kandidat H. Suyikno didukung oleh Tim sukses dan beberapa pihak pendukung.

Penyelenggaraan demokrasi merupakan momentum yang krusial bagi negara Indonesia, karena warga negara berhak berkontribusi dalam memilih pemimpin politik untuk memenangkan dukungan pemilih. Jika dilihat dari sudut pandang normatif pengertian menurut Robert A. Dahl, demokrasi adalah sistem yang secara mutlak bertanggung jawab atas warga negaranya, namun dari sudut pandang empiris seperti Joseph Schumpeter, demokrasi adalah sistem untuk memilih pengambil keputusan melalui pemilu secara berkala.

Pentingnya partisipasi rakyat dalam negara demokrasi sangat menentukan keberlangsungan hidup suatu negara, sehingga rakyat memiliki kekuasaan untuk pengambilan keputusan di bidang politik

---

<sup>1</sup> Patinews.com, (2021) Daftar Lengkap Hasil Pilkades Serentak Kabupaten Pati 2021 [Online]. Tersedia di: <https://www.patinews.com/hasil-pilkades-serentak-kabupaten-pati-2021/> (Diakses: 14 Juni 2022).

dan bidang pemerintahan, melalui perwakilan maupun langsung dan pernyataan pendapat baik lisan maupun tertulis yang dilindungi secara konstitusional. Karenanya hakikat demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Demokrasi menjamin hak setiap orang atas kebebasan berbicara dan hak untuk berekspresi di depan umum, itu pada dasarnya adalah arena persaingan untuk menjadi pemenang perjuangan pendapat, rakyat berhak menentukan pemerintahan yang baik dan dianggap mungkin memenuhi kebutuhannya melalui pemilihan umum (pemilu).

Pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal dari pemerintahan yang demokratis di zaman modern ini. Pemilihan umum saat ini menjadi parameter untuk mengukur demokratis atau tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi secara sederhana adalah suatu sistem politik di mana para pengambil keputusan tertinggi dari sistem tersebut dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala.

Indonesia sebagai negara demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya, di mana pemilihan umum diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan pembangunan di suatu daerah. Pemilu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan kebutuhan rakyat. Pemilu merupakan ajang kontestasi yang memungkinkan para elit politik bangkit menjadi pemimpin baik di tingkat lokal maupun nasional.

Indonesia memiliki banyak pemilihan yang melibatkan rakyat sebagai dasar dari demokrasi yang di gunakan, mulai pemilihan tingkat lokal hingga ke tingkat nasional. Pemilihan tersebut meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/ Kota, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian ditingkat paling bawah yaitu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, Desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Desa seharusnya merupakan media interaksi politik yang simpel dan dengan demikian sangat

potensial untuk dijadikan cerminan kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat negara.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip praktek politik demokratis dapat dimulai dari kehidupan politik di Desa. Unsur-unsur esensial demokrasi dapat diterjemahkan dalam pranata kehidupan politik di level pemerintahan formal paling kecil tersebut. Menurut Robert Dahl, terdapat tiga prinsip utama pelaksanaan demokrasi, yakni kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Dinamika dan konstelasi politik di Desa memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut antara lain ditunjukkan dalam prosesi pemilihan Kepala Desa yang jauh dari hiruk pikuk dunia kepartaian. Dalam kejenuhan yang dihadapi masyarakat dengan tidak sehatnya kehidupan kepartaian di Indonesia, baik karena tidak berjalannya fungsi-fungsi ideal kepartaian termasuk rekrutmen politik maupun ketidakmampuan elit di dalamnya dalam mengartikulasi kepentingan sebagian besar rakyat, seharusnya masyarakat dapat menemukan alternatif lain dalam melaksanakan demokrasi prosedural melalui Pemilihan Umum Kepala Desa (PILKADES).<sup>3</sup>

Pemilihan umum (PEMILU) merupakan suatu proses dimana para pemilih akan memilih orang-orang yang akan mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik tersebut mulai di tingkat pusat seperti presiden hingga di tingkat yang paling rendah Kepala Desa. Sistem pemilu yang diterapkan oleh Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh masyarakat desa.<sup>4</sup>

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksanakan hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta adat istiadat setempat. Mekanisme pemilihan Kepala Desa diatur dalam pasal 31

---

<sup>2</sup> Sastroatmodjo, Soejono, *Perilaku masyarakat* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), 45.

<sup>3</sup> Sorensen, Georg, *Demokrasi dan demokratisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan CCSS, 2003), 19.

<sup>4</sup> Tengku Imam Syarifuddin, Erwin Resmawan, dan Iman Surya, "Strategi Pemenangan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016", *E-Journal Pemerintahan Integratif*, Vol, 7, No. 1 (2019), 53.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Selain itu pemerintah kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan lebih rinci bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para calon Kepala Desa, yaitu:<sup>5</sup>

1. Pencalonan meliputi pendaftaran sebagai bakal calon;
2. Seleksi administrasi;
3. Pengumuman calon Kepala Desa;
4. dan Kampanye.

Dalam mempersiapkan pemilihan seperti itu, sangat umum masing-masing kandidat mempersiapkan *pertandingan politik* mengingat calon pemimpin biasanya lebih dari satu. Masing-masing berlomba-lomba untuk memenangkan pemilu. Mereka berusaha untuk menarik perhatian pemilih untuk memilih mereka. Sebagai bentuk atau praktek demokrasi, suara pemilih tentu menentukan kemenangan. Singkatnya, semakin banyak suara atau dukungan yang didapat, maka ia akan memenangkan pemilu. Dengan demikian, selanjutnya si pemenang akan mendapatkan kursi kekuasaan dalam pemerintahan. Maka setiap kandidat atau calon akan melakukan kampanye politiknya dengan berbagai cara dan strategi.<sup>6</sup>

Kampanye politik merupakan salah satu bagian penting dalam komunikasi politik. Tidak ada peristiwa politik yang luput dari kampanye politik. Kampanye politik dikemas oleh profesional politik sebagaimana tujuan partai politik dan kandidat. Untuk mencapai khalayak politik secara luas dan cepat, kampanye dilaksanakan melalui beragam saluran dan media komunikasi politik. Menurut Dan Nimmo, kampanye adalah upaya untuk mempropagandakan pemberi suara yang potensial. Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Tengku Imam Syarifuddin, Erwin Resmawan, dan Iman Surya, "Strategi Pemenangan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016", 53.

<sup>6</sup> Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 150.

<sup>7</sup> Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik*, 153.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa kampanye politik merupakan (1) proses transformasi informasi dalam beragam bentuk pesan politik kepada khalayak melalui saluran dan media komunikasi tertentu untuk memengaruhi serta menciptakan opini publik; (2) sebuah upaya terorganisasi yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih. Kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pemilihan umum; (3) bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Kampanye politik diatur dengan peraturan tersendiri, baik waktu, tata cara, pengawasan, dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, kampanye politik adalah kegiatan yang bersifat formal sebagai ajang perebutan jabatan politik. Kampanye politik merupakan tindakan politik yang terorganisasi oleh komunikator profesional yang dikenal dengan sebutan tim sukses, konsultan politik/kampanye, manajer kampanye, atau *spin doctor*. Selain itu strategi yang tepat perlu diperhatikan. Agar pelaksanaan kampanye dapat berjalan lancar, dan tujuan tercapai.<sup>8</sup>

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang memberikan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Suatu strategi selalu memiliki satu tujuan yaitu “kemenangan”. Kemenangan akan tetap menjadi fokus utama dari adanya suatu strategi. Jika strategi dikaitkan dengan politik tentu tujuan dari dibentuknya suatu strategi adalah kemenangan politik itu sendiri. Dalam konteks pemilihan umum, sebuah strategi politik diperlukan oleh seorang calon kandidat yang maju dalam pemilihan umum dan menjadikannya sebagai strategi dalam memenangkan pemilihan umum tersebut. Sehingga dalam konteks penelitian ini, seorang calon kandidat kepala desa yang maju dalam pemilihan kepala desa juga membutuhkan suatu strategi politik yang akan berguna untuk memenangkan pemilihan kepala desa yang diikutinya. Maka tidak jarang kandidat melakukan segala cara atau strategi agar bisa memenangkan pemilihan, seperti *money politic*.<sup>9</sup>

Politik uang (*money politic*) dalam pemilihan memang bukan sesuatu yang baru, politik uang sudah ada dalam pemilihan kepala desa (PILKADES). Politik uang digunakan sebagai sebagai taktik untuk memenangkan calon. Pada kasus pilkades, terdapat calon yang

---

<sup>8</sup> Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik*, 153.

<sup>9</sup> Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik*, 158.

sampai menghabiskan Rp 1 miliar. Distribusi politik uang kepada pemilih dalam pilkades pun dilakukan dengan berbagai cara. Modus atau pola praktik politik uang di pilkades berlangsung, (1) dengan cara membeli ratusan kartu suara yang disinyalir sebagai pendukung calon kepala desa lawan dengan harga yang sangat mahal oleh panitia penyelenggara, (2) menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk membagikan uang, (3) serangan fajar, dan (4) penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon kepala desa, yaitu bandar/pemain judi.<sup>10</sup>

Fenomena praktik politik uang yang ada pada dasarnya terjadi untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat sendiri, di mana adanya uang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memberikan pilihan pada calon tertentu. Uang pada saat ini dianggap sebagai media yang paling efektif untuk menghegemoni masyarakat dan menggiring massa untuk membuat pilihan tertentu. Adanya suatu praktik politik uang sebenarnya memang sudah dilarang melalui peraturan perundang-undangan, namun saat masih banyak sekali ditemui ketika menjelang pemilihan.

Berbagai strategi yang diterapkan oleh para kandidat guna mendapatkan dukungan maksimal dari masyarakat pemilih sangat menarik untuk dielaborasikan lebih jauh, yaitu bagaimana kandidat melakukan berbagai strategi-strategi penyesuaian yang sangat berbeda dengan strategi-strategi yang biasanya diterapkan, serta bagaimana kandidat-kandidat memainkan strategi untuk memaksimalkan dukungan masyarakat pemilih.

Salah satu fenomena yang juga menarik dielaborasi adalah bagaimana kandidat dan tim sukses mengelola pluralisme identitas yang ada dalam masyarakat dan dijadikan strategi untuk meraih dukungan masyarakat pemilih. Karena fenomena umum menggambarkan ikatan-ikatan primordialisme yang terbentuk pada wilayah-wilayah yang cukup memiliki faktor perekat yang kuat dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan struktur tingkat lokal. Karena politik identitas yang mulai tergambar sejak awal baik dari saat penentuan kandidat yang akan diusung sampai pada penentuan struktur yang akan dibentuk, pertimbangan keterwakilan identitas baik dari sisi etnis, agama dan identitas-identitas lain. Dianggap menjadi salah faktor penentu bagi unggulnya pasangan kandidat yang akan diusung dimata masyarakat pemilih.

---

<sup>10</sup> Rifaldi Sahea, Burhan Niode, Dan Trilke Tulung, "Analisis Strategi Politik Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013," 2338.

Selain itu yang menarik bagaimana jenis strategi ini sering dijadikan sebagai *black campaign* (kampanye negatif) oleh kandidat untuk menjatuhkan pesaing-pesaing politik mereka. Karena politik identitas bagi beberapa partai politik dan kandidat merupakan strategi awal untuk mencitrakan bahwa mereka lebih baik dari pesaing-pesaing mereka.<sup>11</sup>

Apa yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa tradisi politik Indonesia, bahkan diranah pemilihan kepala desa sekalipun rawan akan praktik *black campaign* (kampanye negatif). Dengan melihat fenomena tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini sekaligus upaya peneliti dalam turut mengawasi jalannya demokrasi serta mengkaji bagaimana strategi-strategi yang digunakan oleh H. Suyikno, SE bersama tim pemenangnya, sehingga peneliti menganggap perlu diadakan penelitian mengenai

Bapak H. Suyikno, S.E menang dua kali hal ini karena strategi yang dipakai atas kemenangan sangat efektif sehingga beliau mendapatkan suara terbanyak walaupun hasilnya tidak berbeda terlalu jauh dengan pesaingnya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Kampanye Politik Pemenang Pemilihan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati Tahun 2021.”**

## B. Fokus penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui strategi kampanye politik pemenang pemilihan kepala desa tahun 2021 Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dengan meneliti dan mengkaji melalui referensi buku maupun jurnal– jurnal lainnya.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi kampanye politik pemenang pemilihan kepala desa tahun 2021 Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati?
2. Apa faktor pendukung kemenangan pemilihan kepala desa tahun 2021 Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ?

---

<sup>11</sup> Rifaldi Sahea, Burhan Niode, Dan Trilke Tulung, “Analisis Strategi Politik Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1 (2018), 3338.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dapat diambil dari adanya penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan strategi kampanye politik pemenang pemilihan kepala desa tahun 2021 Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemenangan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2021.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan tentang bagaimana strategi calon kepala desa pada pemilihan kepala desa 2021. Selain itu, harapan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang apa saja faktor-faktor keberhasilan Calon Kepala Desa di Desa Wonorejo dalam Pilkades 2021. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi pihak-pihak terkait ataupun bagi yang memiliki minat dalam mengkaji terkait calon Kepala Desa dalam Pilkades 2021, yaitu:

##### 1. Secara Teoretis

Adapun manfaat teoretis dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Kajian ini bertujuan untuk membawa referensi dan mengembangkan pilihan wawasan, khususnya dalam kaitannya dengan kepemimpinan politik.
  - b. Dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut, terutama tentang pemimpin dalam proses sosial yang nantinya dapat menjadi khazanah keilmuan.
  - c. Dapat dijadikan bahan untuk memperkaya referensi, khususnya yang terkait dengan pemimpin desa di bidang politik.
- ##### 2. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
- a. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para sarjana, instansi dan lainnya, khususnya untuk mengetahui strategi marketing politik calon kepala desa pada Pilkades 2021.
  - b. Mampu memberikan akan gambaran aktor-aktor dalam pilkades, faktor penyebab keberhasilan calon kepala desa pada pilkades tahun 2021, dan lain sebagainya.
  - c. Mampu memberikan sumber referensi bagi para peneliti yang melakukan penelitian terkait Pilkades.

#### **F. Sistematika Penulisan**

“Sistematika penulisan penelitian skripsi ini mempunyai tujuan untuk menemukan uraian dan sketsa yang berbeda-beda dari setiap bagian atau bagian-bagian yang berkaitan atau berhubungan

satu sama lain agar memiliki kajian yang sistematis dan ilmiah nantinya. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Kerangka Teori**

Bab ini berisi uraian konsep mengenai definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi aspek pemilihan kepala desa wonorejo tahun 2021, strategi yang dilakukan calon kepala desa.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi mengenai: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

### **BAB IV : Hasil Dan Analisis Penelitian**

Bab ini berisi tentang hasil dan analisis terkait dengan faktor-faktor pendukung dan strategi kampanye politik pemenang pemilihan Kepala desa tahun 2021 (Studi Kasus desa Wonorejo, kec. Tlogowungu, kab. Pati).

### **BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa dimasa yang akan datang.